



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami untuk menyelesaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPd.

Dengan demikian diharapkan **Program dan Kegiatan dibidang Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Serta Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup** secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaannya.

Kuala Tungkal, 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP 19680116 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	34
BAB V PENUTUP.....	45

DAFTAR TABEL

TabelT-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	7
Tabel T-C.30 Analisis kinerja pelayanan SKPD	18
Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup	33
Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang dibuat ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran tentang Rencana Kinerja yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana kita ketahui bahwa Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup pemanfaatannya harus diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian Lingkungan Hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta dapat memberikan gambaran yang menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikenal saat ini pada mulanya tahun 2003 disebut Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Kapedalda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada tahun 2008 berdasarkan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 15 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat status kelembagaannya ditingkatkan menjadi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan saat ini menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 06 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan Perbup Tanjung Jabung Barat No. 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 13 ayat (2) “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan” pasal 71 ayat(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota “menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Presiden No.30 Tahun 2020 tentang menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya: Honorarium perjalanan dinas dalam

negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor pengadaan kendaraan dinas dan biaya pemeliharaan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3838)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 86, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3853)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4161)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585)
9. Peraturan pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4815)
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tentang pedoman pengaduan kasus pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup.

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang petunjuk Teknis Standar pelayanan minimal Badan Lingkungan Hidup Daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 Tentang pedoman penentuan status Mutu Air.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
14. Peraturan Menteri dalam negeri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program kegiatan selama 1 (satu) Tahun pada Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu

bagi unit – unit kerja yang ada sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya dan tersusunnya Dokumen perencanaan dibidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program yang lebih terarah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) yang mampu menopang pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Dinas Lingkungan Hidup melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 dan atau sumber dana lainnya.
3. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup secara baik dan seimbang. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam serta terwujudnya penataan hukum dibidang Lingkungan hidup yang tertib baik terhadap masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja kegiatan yang akan berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah *Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 4 (empat) bidang urusan yaitu: **Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Serta Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**.

Selanjutnya Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana **Tabel T-C.29** dibawah ini :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan: 2025

Indikator dan target kinerja perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada sasaran RKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	600%	72.972.028.697	383%	14.239.401.451	100%	5.244.446.667	8%	1.128.524.577							8%	1.128.524.577	391%	15.367.926.028	65,20	57,83	DLH
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	42 Laporan	10.241.475.000	27 Laporan	498.084.900	12 Laporan	131.878.600	3 Laporan	32.100.000							3 Laporan	32.100.000	30 Laporan	530.184.900	71,43	19,76	DLH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 Dokumen	1.195.085.000	32 Dokumen	226.839.900	8 Dokumen	70.648.600	2 Dokumen	18.600.000							2 Dokumen	18.600.000	34 Dokumen	245.439.900	61,82	20,54	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	1.500.000.000	16 Dokumen	271.245.000	4 Dokumen	61.230.000	1 Dokumen	13.500.000							1 Dokumen	13.500.000	17 Dokumen	284.745.000	85,00	18,98	DLH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan OPD	24 Laporan	25.978.632.584	17 Laporan	10.194.935.180	1 Laporan	3.833.905.067	- Laporan	841.313.108							- Laporan	841.313.108	17 Laporan	11.036.248.288	70,83	186,05	DLH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/Bulan	19.770.872.584	89 Orang/Bulan	8.857.927.980	24 Orang/Bulan	3.342.071.067	20 Orang/Bulan	730.023.108							20 Orang/Bulan	730.023.108	109 Orang/Bulan	9.587.951.088	75,69	48,50	DLH
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.755.700.000	8 Dokumen	908.913.000	2 Dokumen	324.750.000	1 Dokumen	73.790.000							1 Dokumen	73.790.000	9 Dokumen	982.703.000	75,00	55,97	DLH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20 Laporan	600.000.000	16 Laporan	238.801.200	4 Laporan	69.840.000	1 Laporan	15.000.000							1 Laporan	15.000.000	17 Laporan	253.801.200	85,00	42,30	DLH
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	520.000.000	8 Dokumen	177.793.000	2 Dokumen	97.244.000	1 Dokumen	22.500.000							1 Dokumen	22.500.000	9 Dokumen	200.293.000	90,00	38,52	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	23 Laporan	2.966.883.071	13 Laporan	469.416.767	3 Laporan	134.092.000	- Laporan	30.961.719							- Laporan	30.961.719	13 Laporan	500.378.486	56,52	85,41	DLH
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	35.870.000	4 Laporan	10.370.000	1 Laporan	3.000.000	- Laporan	500.000							- Laporan	500.000	4 Laporan	10.870.000	66,67	30,30	DLH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1.373.000.000	4 Laporan	302.989.527	1 Laporan	70.992.000	- Laporan	14.411.721							- Laporan	14.411.721	4 Laporan	317.401.248	66,67	23,12	DLH
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	538.013.071	4 Laporan	156.057.240	1 Laporan	60.100.000	- Laporan	16.049.998							- Laporan	16.049.998	4 Laporan	172.107.238	66,67	31,99	DLH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	1.339 Unit	14.196.359.900	209 Unit	925.328.263	44 Unit	368.600.000	14 Unit	78.823.300							14 Unit	78.823.300	223 Unit	1.004.151.563	17	63,86	DLH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	234 Unit	1.601.799.900	162 Unit	595.512.044	38 Unit	249.500.000	12 Unit	57.040.000							12 Unit	57.040.000	174 Unit	652.552.044	74,36	40,74	DLH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 Unit	1.520.400.000	14 Unit	329.816.219	6 Unit	119.100.000	2 Unit	21.783.300							2 Unit	21.783.300	16 Unit	351.599.519	59,26	23,13	DLH
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20 Dokumen	5.177.213.000	10 Dokumen	1.887.313.450	1 Dokumen	150.360.000	- Dokumen	42.753.350							- Dokumen	42.753.350	10 Dokumen	1.930.066.800	50,00	33,53	DLH
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS	16 Dokumen	4.621.263.000	1 Dokumen	1.601.115.200	1 Dokumen	150.360.000	- Dokumen	42.753.350							- Dokumen	0	1 Dokumen	1.601.115.200	6,25	40,97	DLH
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	713.115.500	2 Dokumen	372.538.250	1 Dokumen	150.360.000	- Dokumen	42.753.350							- Dokumen	42.753.350	2 Dokumen	415.291.600	66,67	58,24	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/ IKEG	67/95/57.5/79.2/75.6	6.443.750.000	70.00/95.75/55.98/0/0	643.543.897	66.5/94.8/57.0/78.8/75.2	62.720.000	0/0/0/0/0	19.500.000							70.00/95.75/55.98/0/0	19.500.000	70.00/95.75/55.98/0/0	663.043.897	101,43	30,24	DLH
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11 Laporan	5.170.700.000	5 Laporan	538.749.897	2 Laporan	62.720.000	- Laporan	19.500.000							- Laporan	19.500.000	5 Laporan	558.249.897	45,45	28,73	DLH
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 Dokumen	4.180.700.000	3 Dokumen	395.180.897	1 Dokumen	44.240.000	- Dokumen	15.000.000							- Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	410.180.897	50,00	9,81	DLH
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	990.000.000	2 Dokumen	182.769.000	1 Dokumen	18.480.000	- Dokumen	4.500.000							- Dokumen	4.500.000	2 Dokumen	187.269.000	40,00	18,92	DLH
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	450%	23.670.750.000	230%	3.030.689.970	85%	1.102.308.800	100%	227.127.500							100%	227.127.500	330%	3.257.817.470	73,26	53,63	DLH
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	450%	23.670.750.000	230%	3.030.689.970	85%	1.102.308.800	100%	227.127.500							100%	227.127.500	330%	3.257.817.470	73,26	53,63	DLH
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Ha	17.800.000.000	60 Ha	1.785.540.970	21 Ha	755.220.000	21 Ha	185.930.000							21 Ha	185.930.000	81 Ha	1.971.470.970	79,41	11,08	DLH
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3.090 Unit	5.000.000.000	72 Unit	1.074.067.000	18 Unit	347.088.800	18 Unit	41.197.500							18 Unit	41.197.500	90 Unit	1.115.264.500	2,91	22,31	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PADA USAHA/ KEGIATAN	600%	3.591.085.000	156%	540.622.315	100%	55.580.000	0%	10.961.970							0%	10.961.970	156%	551.584.285	26%	15,36	DLH
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	600%	3.591.085.000	156%	540.622.315	100%	55.580.000	0%	10.961.970							0%	10.961.970	156%	551.584.285	26%	15,36	DLH
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	3.591.085.000	13 Laporan	540.622.315	1 Laporan	55.580.000	- Laporan	10.961.970							- Laporan	10.961.970	13 Laporan	551.584.285	26,00	15,36	DLH
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	600%	2.404.600.000	106%	368.417.750	100%	98.720.000	13%	24.800.000							13%	24.800.000	119%	393.217.750	19,83	71,34	DLH
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600%	2.404.600.000	106%	368.417.750	100%	98.720.000	13%	24.800.000							13%	24.800.000	119%	393.217.750	19,83	71,34	DLH
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100 Dokumen	664.950.000	28 Dokumen	155.509.000	30 Dokumen	80.240.000	1 Dokumen	20.300.000							1 Dokumen	20.300.000	29 Dokumen	175.809.000	29,00	26,44	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	130 Badan Usaha	712.550.000	10 Badan Usaha	27.086.750	30 Badan Usaha	18.480.000	7 Badan Usaha	4.500.000							7 Badan Usaha	4.500.000	17 Badan Usaha	31.586.750	13,08	4,43	DLH
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	500%	1.218.550.000	200%	438.768.000	100%	13.480.000	0%	3.000.000							0%	3.000.000	200%	452.768.000	40,00	18,95	DLH
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Data Inventarisasi MHA Kearifan Lokal Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	6 Dokumen	618.550.000	2 Dokumen	438.768.000	1 Dokumen	13.480.000	- Dokumen	3.000.000							- Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	452.768.000	33,33	18,95	DLH
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	6 Dokumen	618.550.000	2 Dokumen	114.236.000	1 Dokumen	13.480.000	- Dokumen	3.000.000							- Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	117.236.000	33,33	18,95	DLH
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERESENTASE MASYARAKAT KECAMATAN YANG MENINGKAT PENGETAHUAN/ PEMAHAMAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	495%	758.550.000	233%	162.266.000	100%	31.195.000	0%	5.500.000							0%	5.500.000	233%	167.766.000	47,14	22,12	DLH
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi/ Pelatihan	33 Sekolah	758.550.000	15 Sekolah	162.266.000	6 Sekolah	31.195.000	- Sekolah	5.500.000							- Sekolah	5.500.000	15 Sekolah	167.766.000	45,45	22,12	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	55 Kelompok	940.000.000	10 Kelompok	64.902.000												Kelompok	0	10 Kelompok	64.902.000	18,18	6,90	DLH
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5.620 Unit	53.010.000.000	3.395 Unit	24.755.297.355	1.000 Unit	6.455.055.000	190 Unit	1.246.589.197								190 Unit	1.246.589.197	3.585 Unit	26.001.886.552	63,79	49,05	DLH
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	84.000 Ton	8.470.000.000	40.917 Ton	1.038.232.488	82.000 Ton	1.444.072.000	4.018,5 Ton	199.249.997								4.019 Ton	199.249.997	44.935 Ton	1.237.482.485	53,49	14,61	DLH
Rata-rata capaian kinerja (%)																				49,68	38,53				
Predikat kinerja																				S	SR				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kinerja dapat terpenuhi dengan kerjasama antar bidang dan seksi serta stakeholder secara terintegrasi dalam komando Kepala OPD

Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Kinerja adalah sebagian besar kegiatan dalam pengadministrasian pelaksanaan kegiatan, kurangnya kualitas dan jumlah SDM yang mampu menjalankan kegiatan secara teknis, serta kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Disusun
Kuala Tungkal, tanggal 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Nip. 19680116 199703 1 002

Dievaluasi
Kuala Tungkal, tanggal 2025
Pjt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT

FERI NOPRIYANTO, SE
Nip. 197301116 200003 1 002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten dan ibu kota, tentu memiliki permasalahan Lingkungan Hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan baik seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas membidangi Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas. Berikut tabel analisis kinerja pelayanan OPD :*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

Berikut Tabel T-C.30 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel T-C.30

Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (UKL-UPL / AMDAL)	%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%
2	Jumlah usaha dan kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran air	%	65%	80%	92%	94%	60%	70%	80%	92%
3	Jumlah usaha dan kegiatan tidak bergerak yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dan pencemaran udara	%	100%	100%	100%	100%	90%	95%	100%	100%
4	Jumlah pengaduan yang diterima	%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%
5	Jumlah volume sampah setiap tahunnya	Ton	75.000 Ton	78.000 Ton	80.000 Ton	82.000 Ton	14.499 Ton	15.607 Ton	65.000 Ton	70.000 Ton

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

1. Dibidang Persampahan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih, terutama di Kota Kuala Tungkal. Terlihat dari data volume sampah yang dari tahun ke tahun selalu meningkat, volume sampah di kota Kuala Tungkal mencapai **40.917** Ton di Tahun 2024, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah domestik dan rumah tangga juga keterbatasan dana untuk mengolah daur ulang sampah. Pertumbuhan pemukiman penduduk yang tinggi didaerah perkotaan sebagai ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat diakibatkan karena aktivitas ekonomi dan pusat pemerintahan, sehingga menyebabkan pemukiman didaerah ini menjadi semakin padat. Hal ini memacu peningkatan permintaan lahan dan daya dukung lingkungan untuk pemukiman atau perumahan, keterbatasan lahan di Kecamatan Tungkal Ilir Khususnya Kota Kuala Tungkal yang berada di daerah dataran rendah merupakan daerah genangan air, Tidak sedikit areal bantaran sungai yang dijadikan tempat pemukiman yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendangkalan sungai, ini menjadi salah satu penyebab banjir atau naiknya air laut melimpah ke jalan ketika terjadi pasang besar (rob) pada bulan - bulan tertentu. Banyak pertumbuhan dunia usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdampak terhadap Lingkungan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas atau kerusakan lingkungan karena air limbah yang mengalir dipesisir sungai dan laut yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk pengukuran Titik sampling diperlukan penambahan titik sampling pengukuran

udara dan air serta untuk melakukan pengukuran sendiri Indeks Tutupan Lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar nilai Indeks Lingkungan yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tahun 2024 untuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni 77,36.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama kurun waktu 5(Lima) tahun terakhir (2016 – 2021), dalam pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang mana belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan ini diperburuk lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir di seluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 – 2026, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah dalam Ibukota Kabupaten/ Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut

pertanian menjadi lahan - lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (*Climate Change*) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020, merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2021-2026 melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, tetapi merupakan peluang dan tanggung jawab bersama untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut :

- a)** Masih sedikitnya jumlah personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik – teknik pengendalian dampak lingkungan.
- b)** Masih lemahnya kinerja personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- c)** Masih lemahnya proses komunikasi timbal balik antara Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pihak yang berkompeten dan stakeholder lainnya.
- d)** Masih kurangnya kendaraan operasional untuk ke lapangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dibuat berdasarkan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada secara nasional, antara lain: a) Kebakaran hutan dan lahan b) Kerusakan hutan akibat hutan *open access* yang tidak terkelola; c) terjadinya lahan kritis; d) besarnya beban pencemar; e) pelanggaran tata ruang dan perijinan. Tidak hanya bencana lingkungan yang cenderung semakin meningkat, namun juga terjadi semakin maraknya konflik sosial, adanya kesenjangan kondisi antar ekoregion/pulau, ketimpangan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Berbagai situasi tersebut sesungguhnya merupakan produk kumulatif dari pembangunan berbagai sektor antara lain:

- a) belum terselesaikannya persoalan hak-hak atas SDA dan pengelolaannya secara adil;
- b) kebijakan pembangunan yang masih kuat diimplementasikan pada tataran produksi dan eksploitasi SDA, sedangkan pengendalian daya dukung lingkungan hidup melalui kerjasama antar wilayah administrasi belum kuat;
- c) kebijakan anggaran berbasis lingkungan yang belum terwujud dengan baik, termasuk juga internalisasi biaya lingkungan dan dampaknya ke dalam biaya produksi;
- d) belum efektifnya upaya konservasi dan rehabilitasi dari berbagai aspek seperti: rendahnya insentif dan disinsentif, ketepatan ukuran kinerja, pendekatan yang hanya berbasis proyek;
- e) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat hanya dilakukan pada bagian hilir dari proses pembangunan saja, namun penyelesaiannya perlu diperkuat untuk masuk ke hulu atau akar masalah.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang nantinya perlu dituangkan dalam RPPLH Nasional antara lain:

a) Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Informasi dan pengetahuan sangat penting untuk selalu diperbarui untuk menjadi dasar bagi pengendalian pembangunan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Keterbukaan informasi bagi stakeholders, termasuk status LH dan transparansi perizinan pemanfaatan SDA, akan menjadi sumber pengetahuan dan pengawasan LH oleh publik.

b) Kapasitas Lembaga dan Pengorganisasian dalam Implementasi Kebijakan

Kepemimpinan dan kapasitas jaringan kerja yang kuat pada seluruh stakeholder dalam arti luas di pusat maupun daerah yang terkait dengan penguatan dan implementasi secara efektif kebijakan PPLH termasuk PSDA. Dengan pemahaman bahwa kinerja perlindungan dan pengelolaan LH sangat ditentukan oleh perilaku seluruh stakeholder. Perbaikan kinerja LH yang menuntut visi jangka panjang cenderung kurang harmonis dengan arah pembangunan ekonomi dan politik eksploitasi SDA jangka pendek sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi. Dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi ataupun batas yurisdiksi sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung pada kerjasama antar wilayah administrasi maupun antar sektor. Penetapan program pembangunan bersama antar wilayah administrasi dan antar sektor dengan mempertahankan daya dukung lingkungan menjadi keniscayaan. Untuk menghindari konflik kepentingan antar pihak dalam membangun program pembangunan bersama tersebut, perlu dibangun leadership Lingkungan Hidup yang antara lain mengembangkan

jejaring LH termasuk dengan para pihak di luar pemerintah (LSM, Media, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, DPR/D, dll).

c) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam (SDA)

SDA yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti hutan, tambang, dan kebun sudah sampai pada kondisi kritis, bukan hanya menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk hilangnya sumber-sumber air bersih, tetapi juga menjadi sumber konflik dan ketidakadilan pemanfaatannya. Di sisi lainnya, sumber daya perairan/laut masih belum optimal pemanfaatannya, terjadi kemiskinan nelayan di satu sisi dan di sisi lain telah terjadi kerusakan habitat dan over eksploitasi beberapa jenis ikan. Untuk melakukan penghematan dan pencadangan pemanfaatan SDA secara umum.

d) Perlindungan dan pemulihan daya dukung

Terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemulihan daya dukung, termasuk pemulihan masalah sosial, merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan untuk perlindungan dan konservasi SDA, terutama di kawasan lindung, perlu mendapat prioritas antara lain melalui penerapan kebijakan ekonomi, regulasi dan insentif Lingkungan Hidup.

e) Pengendalian beban lingkungan hidup

Kapasitas pengendalian beban lingkungan hidup di Indonesia tidak sebanding dengan sebaran lokasi sumber pencemar yang sangat luas. Sementara itu kebijakan penataan ruang dan kebijakan lainnya belum mampu menanggulangi semakin terkonsentrasinya beban lingkungan hidup di wilayah-wilayah perkotaan, pelabuhan dan industri. Terkait dengan pengendalian beban lingkungan hidup diperlukan prioritas pada kawasan khusus

seperti urban-perkotaan, pelabuhan, industri, dll sebagai wilayah target pengendalian beban lingkungan.

f) Kebijakan Penegakan hukum

Disamping itu, peningkatan kapasitas tersebut perlu pula diwujudkan melalui pengembangan jejaring hukum lingkungan Kapasitas yustisi dalam penegakan hukum lingkungan perlu diperluas dengan mengaitkan pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang, tindak pidana korupsi, dll. sehingga terwujud kluster-kluster di setiap wilayah ekoregion.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja OPD)

Berdasarkan rumusan visi dan misi tersebut diatas, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh ***Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026*** adalah:

Tujuan : *Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup*

Sasaran Strategis :

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, maka ***Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran-sasaran strategis*** yaitu :

- 1. Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat***
- 2. Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat***

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun ke-)	Sumber Data
					2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	68.90	Uji Sampling dan Data Dari Pusat
		Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup $= \frac{(JUK \text{ (Jumlah Usaha Kegiatan)})}{(JIL \text{ (Jumlah Izin Lingkungan)})} \times 100\%$	100%	Dunia Usaha

Kuala Tungkal, tanggal
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2025



SUPARIO,SE
 Nip. 19680116 199703 1 002

BAB IV
RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi jangka menengah daerah. Rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan menjadi instrumen serta indikator utama dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung. Proses penyusunan RENJA ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan APBD serta bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyusunan ini juga merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

Penyusunan program dan kegiatan RENJA mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889, yang memuat hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di tahun mendatang.